

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
PT BPR TANAH LAUT

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
31 Desember 2024

Nomor : 00190/3.0290/AU.2/1183-2/1/IV/2025

Tanggal : 8 April 2025

PT. BPR TANAH LAUT

Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2024 dan 2023

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Tanggungjawab Direksi.....	1
Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023.....	2
Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	3
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023....	4
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.....	5
Catatan atas Laporan Keuangan.....	6
Laporan Auditor Independen	



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TANAH LAUT
" BPR TALA (PERSERODA) "**

JL. Pangeran Antasari No. 10 Telp. 0512-22603 www.bprtala.co.id
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (70814) Kalimantan Selatan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PT. BPR TANAH LAUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Suprpto
Alamat Kantor	: JL. Pangeran Antasari No. 10
Alamat Domisili/ sesuai KTP	: HM DJAPRI No 4B RT.03 RW.02 Kel. Atu-atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
Nomor Telepon Kantor	: 0512-22603
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Rinanto
Alamat Kantor	: JL. Pangeran Antasari No. 10
Alamat Domisili/ sesuai KTP	: JL PELAIHARI-TAKISUNG RT. 005 RW. 002 DS. TELA
Nomor Telepon Kantor	: 0512-22603
Jabatan	: Direktur Operasional

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Tanah Laut;
2. Laporan keuangan PT. BPR Tanah Laut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Tanah Laut telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan PT. BPR Tanah Laut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. BPR Tanah Laut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanah Laut, 8 April 2025

Direktur Utama

Direktur Operasional

(.....) (.....)

PT. BPR TANAH LAUT
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u> <u>Rp</u>	<u>2023</u> <u>Rp</u>
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas	4	105.546.500	113.010.500
Penempatan Pada Bank Lain	5	32.056.130.495	28.209.641.437
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	6	223.450.379	225.828.888
Kredit yang Diberikan	7	15.232.279.616	17.146.202.769
Biaya Dibayar Dimuka	8	-	28.676.008
Jumlah Aset Lancar		47.617.406.990	45.723.359.602
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp527.187.239 tahun 2024 dan Rp404.511.483 tahun 2023	9	417.724.961	420.292.217
Aset Lain-lain	10	7.127.089	2.574.467
Aset Tidak Berwujud	11	70.489.433	85.873.933
Jumlah Aset Tidak Lancar		495.341.483	508.740.617
JUMLAH ASET		48.112.748.473	46.232.100.219
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	12	234.968.180	152.631.733
Hutang Bunga	13	-	4.561.559
Hutang Pajak	14	43.363.725	56.657.735
Tabungan	15	4.529.473.701	3.422.500.888
Deposito Berjangka	16	2.565.000.000	1.880.000.000
Pinjaman Diterima	17	32.437.000.000	33.000.000.000
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	18	380.302.069	136.155.083
Jumlah Kewajiban		40.190.107.675	38.652.506.998
EKUITAS			
Modal	19		
<i>Modal Saham Disetor - 122.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50.000 per saham</i>		6.100.000.000	6.100.000.000
Cadangan	20	514.771.320	273.565.844
Saldo Laba	21	1.307.869.478	1.206.027.377
Jumlah Ekuitas		7.922.640.798	7.579.593.221
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		48.112.748.473	46.232.100.219

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.*

Tn. Suprpto
Direktur Utama

PT. BPR TANAH LAUT
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u> <u>Rp</u>	<u>2023</u> <u>Rp</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
- Pendapatan Bunga	22	5.450.279.044	4.895.173.522
Total Pendapatan		5.450.279.044	4.895.173.522
Beban Operasional			
- Beban Bunga	23	(178.690.518)	(127.402.815)
Pendapatan Bunga Bersih		5.271.588.526	4.767.770.707
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Operasional Lainnya	24	68.782.392	82.044.877
Beban Operasional			
- Beban Penyisihan Penghapusan	25	(368.850.444)	(781.595.912)
- Beban Administrasi dan Umum	26	(3.417.988.105)	(2.649.313.923)
- Beban Operasional Lainnya	27	(92.299.166)	(80.138.798)
Beban Operasional Bersih		(3.879.137.715)	(3.511.048.633)
Laba (Rugi) Operasional		1.461.233.203	1.338.766.951
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional		-	-
Beban Non Operasional	28	-	(500.000)
Total Pendapatan Non Operasional		-	(500.000)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1.461.233.203	1.338.266.951
- Beban Pajak Penghasilan		(153.363.725)	(132.239.574)
LABA BERSIH		1.307.869.478	1.206.027.377

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Tn. Suprpto
Direktur Utama

PT. BPR TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	Modal Disetor	Saldo Laba (Rugi) Ditahan	Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 Januari 2023	6.100.000.000	1.112.243.789	7.212.243.789
Pembagian Laba Tahun Lalu	-	(1.112.243.789)	(1.112.243.789)
Cadangan Umum	-	136.782.922	136.782.922
Cadangan Tujuan	-	136.782.922	136.782.922
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	1.206.027.377	1.206.027.377
Saldo per 31 Desember 2023	6.100.000.000	1.479.593.221	7.579.593.221
Pembagian Laba Tahun Lalu	-	(1.479.593.221)	(1.479.593.221)
Cadangan Umum	-	257.385.660	257.385.660
Cadangan Tujuan	-	257.385.660	257.385.660
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	1.307.869.478	1.307.869.478
Saldo per 31 Desember 2024	6.100.000.000	1.822.640.798	7.922.640.798

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BPR TANAH LAUT**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

	2024	2023
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Bersih	1.307.869.478	1.206.027.377
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi :		
Beban Penyusutan Aset Tetap	122.675.756	97.558.393
Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu	-	75.572.022
Penyisihan Kerugian Antar Bank Aktiva	(3.271.535)	33.745.859
- PPAP Provisi	29.364.496	33.745.859
Kredit yang diberikan	(110.791.444)	77.634.370
Laba Bersih Setelah Penyesuaian	1.345.846.751	1.524.283.880
Perubahan Modal Kerja		
PBYAD (Pinjaman)	2.378.509	17.168.701
Kredit yang Diberikan	1.995.350.101	179.467.271
Biaya Dibayar Dimuka	28.676.008	(28.676.008)
Kewajiban Segera	82.336.447	(6.662.211)
Hutang Bunga	(4.561.559)	2.769.153
Hutang Pajak	(13.294.010)	52.736.321
Tabungan	1.106.972.813	368.335.267
Deposito Berjangka	685.000.000	1.135.000.000
Kewajiban Lain-lain	244.146.986	(231.707.888)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.472.852.046	3.012.714.486
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset Tetap	(120.108.500)	(163.381.800)
Aset Tidak Berwujud	15.384.500	14.589.484
Aset Lain-lain	(4.552.622)	1.058.100
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(120.108.500)	(147.734.216)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Yang Diterima	(563.000.000)	9.751.639.500
Cadangan	514.771.320	222.448.758
Pembagian Laba Tahun Lalu	(1.479.593.221)	(1.112.243.789)
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN	(1.527.821.901)	8.861.844.469
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	3.824.921.645	11.726.824.739
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	25.231.646.697	13.504.821.958
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	29.056.568.342	25.231.646.697
Rincian Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		
a Kas	105.546.500	113.010.500
b Tabungan dan Giro	3.222.156.139	2.928.699.095
c Deposito	28.850.000.000	25.300.000.000

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

1. UMUM

a. Informasi Umum Perusahaan

PT. BPR Tanah Laut berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 10, Kecamatan Pelihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (disebut "Bank") didirikan berdasarkan:

- Perubahan Direksi dan Komisaris sesuai dengan akta No. 28 dibuat oleh Neddy Firmanto, SH di Banjar pada tanggal 15 Februari 2019. Akta telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043487 .AH.01.11. Tahun 2019 pada tanggal 15 Maret 2019.
- Perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor pasal 20 sesuai dengan akta No. 21 dibuat oleh Neddy Firmanto, SH notaris di Banjar pada tanggal 17 Juli 2019. Akta telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0112595.AH.01.11. Tahun 2019 pada tanggal 17 Juli 2019.
- Perubahan Komisaris sesuai dengan akta No. 29 dibuat oleh Neddy Firmanto, SH di Banjar pada tanggal 28 September 2022. Akta telah memperoleh pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0299124. Tahun 2019 pada tanggal 17 Juli 2019.

Adapun perijinan yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 31.812.283.5-732.000
- Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 510/0534/DPM-PTSP/PM/XI/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Tanah Laut Dinas Penanaman Modal & PTSP pada tanggal 26 November 2022
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor. 16.05.01.64.00060 dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Tanah Laut Dinas Penanaman Modal& PTSP pada tanggal 26 November 2022
- Nomor Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor. 503/194.B-PT/DPM-PTSP/XI/2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Tanah Laut Dinas Penanaman Modal & PTSP pada tanggal 22 November 2022.

Kegiatan Usaha Bank :

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, PT. BPR Tanah Laut melakukan aktivitas utama sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu menghimpun dana dari pihak ketiga berupa tabungan dan deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun aktiva produktif lainnya serta membantu Pemerintah dalam pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang.

Maksud dan Tujuan :

Berdasarkan akta No 28 yang dibuat oleh Neddy Farmanto, SH. Notaris di Banjar tanggal 15 Februari 2019 tentang pendirian perseroan pada pasal 2. Maksud dan Tujuan BPR adalah untuk menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BPR melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1 Menghimpun dana Masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan
- 2 Memberikan kredit
- 3 Melaksanakan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan undang undang perbankan yang berlaku.
- 4 Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Susunan Pengurus PT. BPR Tanah Laut per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Tn. Suprpto
Direktur	: Tn, Rinanto
Komisaris Utama	: Ny. Fifiana Fitri Amalia
Komisaris	: Tn. Joko Wuryanto

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

b. Manajemen Resiko

PT. BPR Tanah Laut mencoba melakukan penerapan sistem manajemen resiko yang mencakup resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas dan resiko operasional yang ditempuh dengan cara :

- a Pengelolaan kredit antisipasi dilakukan melalui penerapan prinsip kehati hatian dengan mencoba melakukan analisa secara lebih mendalam serta tahapan keputusan kredit sesuai dengan kewenangan dan penerapan tabungan buku sebesar satu kali angsuran pada setiap pencarian baru maupun perpanjangan
- b Pengelolaan resiko pasar dilakukan dengan cara memantau dan mengevaluasi perkembangan suku bunga dana guna mengantisipasi penarikan/pemindahan dana dari BPR ke bank lain.
- c Mengelola resiko likuiditas dilakukan melalui tindakan pemantauan terhadap kewajiban bank kepada pihak ketiga serta penetapan ratio likuiditas diatas ketentuan yang berlaku
- d Pengelolaan resiko operasional dilakukan dengan penyempurnaan prosedur kerja, memberikan fasilitas kepada para pegawai untuk melanjutkan tingkat pendidikan, melakukan penyempurnaan terhadap program komputerisasi penunjang operasional guna mengurangi kesalahan dalam pencatatan serta peningkatan sarana dan prasarana kerja yang telah representatif.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN

Direksi PT. BPR Tanah Laut menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

PT. BPR Tanah Laut menetapkan SAK ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan perseroan

Laporan keuangan PT. BPR Tanah Laut terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perseroan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. namun jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

c. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PT. BPR Tanah Laut mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i Secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a) Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan fellow).
 - b) Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas.
 - c) Memiliki pengendalian bersama atas entitas
- ii Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas.
- iii Pihak tersebut adalah joint ventures di mana entitas tersebut merupakan venturer.
- iv Pihak tersebut adalah personel manajemen kunci entitas atau entitas induknya.
- v Pihak tersebut adalah keluarga dekat dari setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv).
- vi Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan. Secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) atau (v).
- vii Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

d. Pendapatan dan Beban

Definisi Pendapatan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 2) Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).
- 3) Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase
- 4) Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
- 5) Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

I Pendapatan Bunga

- a Pendapatan bunga antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.
- b Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan

II Pendapatan Operasional Lainnya

- a Pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan.
- b Contoh dari pendapatan operasional lainnya adalah komisi/fee dari transaksi payment point, jasa pengiriman uang, transaksi ATM, pendapatan administrasi tabungan, penalti pencairan deposito lebih awal, keuntungan akibat penjualan kas dalam valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang dikenakan oleh BPR kepada nasabah, penerimaan dari kredit yang telah dihapus buku, pemulihan penyisihan kerugian kredit dan lain-lain.

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Beban Operasional

Beban Operasional dirinci menjadi:

1) **Beban Bunga**

- a. Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman
- b. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, cash back dan hadiah deposito berjangka.
- c. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.
- d. Penjelasan lebih lanjut mengenai beban bunga mengacu pada Bab V tentang Akuntansi Kewajiban.

2) **Beban Penyisihan Kerugian**

- 3) **Beban pemasaran**, termasuk pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, iklan dalam rangka promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui.
- 4) **Beban penelitian dan pengembangan** yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR.
- 5) **Beban administrasi dan umum** adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional BPR.
- 6) **Beban operasional lainnya** adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas, misalnya kerugian akibat penjualan kas dalam valuta asing, kerugian akibat penjualan SBI

e. Imbalan Pasca Kerja

PT. BPR Tanah Laut mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti kerja dalam hal ini mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perusahaan belum menerapkan penilaian dan penghitungan imbalan kerja, sehingga belum dapat diketahui dampak materialitas terhadap laporan keuangan.

f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan SAK ETAP yang berlaku efektif per 01 Januari 2010, diatur pada bab 24, Perseroan menggunakan tax payable concept, yaitu mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perseroan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tahun 2024, BPR telah menghitung kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif PPh Pasal 31 E dan Pasal 17. Ditahun 2020 terdapat kejadian luar biasa wabah Covid 19 maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 dan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2020 tanggal 21 April 2020, maka BPR mengikuti penurunan tarif yang semula 25% menjadi 22%

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

h. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

i. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai secondary reserve.

Giro pada Bank Umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Tabungan pada Bank Lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Deposito pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

Sertifikat Deposito pada Bank Umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

j. Kredit Yang Diberikan

Kredit disajikan sebesar jumlah bruto kredit Bank yang belum dilunasi oleh nasabah, dikurangi dengan penyisihan penghapusan kredit. Penyisihan tersebut merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan atas kredit yang diberikan ditetapkan berdasarkan review terhadap masing-masing debitur pada akhir bulan.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan

Kredit diklasifikasikan sebagai non-performing pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai non performing tidak diperhitungkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit akan dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak dapat ditagih kembali. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan diakui sebagai penyesuaian terhadap penyisihan penghapusan kredit jika terdapat sisa dan diakui sebagai pendapatan bunga.

k. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur. Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

I. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis, dengan rincian sebagai berikut :

<u>Jenis Aktiva Tetap</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>	<u>Persentase/tahun</u>
Kendaraan	8 Tahun	12,5%
Inventaris Kantor	4 Tahun	25%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan, dan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan aktiva tetap yang bersangkutan dilaporkan dalam laporan laba-rugi tahun berjalan.

m. Agunan Yang Diambilalih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

n. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

o. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

p. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

q. Kewajiban Segera

Kewajiban Segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

r. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

s. Utang Pajak

Utang Pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR

t. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

u. Pinjaman Diterima

Pinjaman Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

v. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti. Perseroan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

4. KAS

	2024	2023
	Rp	Rp
Kas Induk	105.546.500	113.010.500
Jumlah	105.546.500	113.010.500

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
Tabungan		
PT. BPD Kalimantan Selatan	1.651.588.492	1.562.527.028
PT. Bank Muamalat	36.658.900	164.614.585
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	574.200.278	243.368.503
PT. Bank Mandiri	624.453.936	651.912.216
PT. Bank BSI	210.616.172	129.097.384
PT. Bank Delima	-	-
PT. Bank Mitratama Arthabuana	54.235.898	47.851.446
PT. Bank BPRS Barkah Gemadama	70.402.463	129.327.933
Jumlah	3.222.156.139	2.928.699.095
Giro		
Giro BJB Banjarmasin	27.732.298	27.971.819
Jumlah	27.732.298	27.971.819
Deposito		
Deposito PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	4.000.000.000	4.500.000.000
Deposito BPD Kalimantan Selatan	5.100.000.000	7.100.000.000
Deposito BPR Batola	450.000.000	200.000.000
Deposito BPR Multidhana Bersama	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito BPR Martapura Banjar Sejahtera	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR Naga Jaya Raya	-	500.000.000
Deposito BPRS Barkah Gemadama	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito Muamalat Indonesia	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito BPR Sekar Kaltim	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito BPR Mitratama Arthabuana	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito BPR Kota Pasuruan	1.250.000.000	500.000.000
Deposito BPR Bank Daerah Bojonegoro	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito BPR Bank Jombang	1.500.000.000	1.500.000.000
Deposito BPR BKK Wonosobo	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito BPR Majatama	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito BPR Bontang Sejahtera	1.000.000.000	-
Deposito BPR Madiun	1.300.000.000	-
Deposito BPR Kediri	1.000.000.000	-
Deposito BPR Kutai Timur	1.000.000.000	-
Deposito BPR Tulungagung Persero	1.250.000.000	-
Jumlah	28.850.000.000	25.300.000.000
Total	32.099.888.437	28.256.670.914
Penyisihan Kerugian Antar Bank Aktiva	(43.757.942)	(47.029.477)
Jumlah	32.056.130.495	28.209.641.437

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

6. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2024	2023
	Rp	Rp
PBYAD Kredit Performing (Accrual)	223.450.379	225.828.888
Jumlah	223.450.379	225.828.888

7. KREDIT YANG DIBERIKAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Kredit yang Diberikan	16.434.871.095	18.430.221.196
<u>KYD - Provisi</u>		
Provisi dan Admin Pinjaman	(272.705.173)	(243.340.677)
Penyisihan Penghapusan	(929.886.306)	(1.040.677.750)
Jumlah	15.232.279.616	17.146.202.769

	2024	2023
	Rp	Rp
KOLEKTIBILITAS KREDIT		
- Kolektibilitas 1	14.685.183.597	16.159.616.496
- Kolektibilitas 2	685.819.198	986.725.899
- Kolektibilitas 3	169.450.600	198.462.000
- Kolektibilitas 4	150.954.000	360.242.600
- Kolektibilitas 5	743.463.700	725.374.200
Jumlah Kolektibilitas	16.434.871.095	18.430.421.195
 - Jumlah Kredit	 16.434.871.095	 18.430.421.195

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan aset produktif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 33/POJK.03/2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 17/POJK.03/2021.

8. Biaya Dibayar Dimuka

	2024	2023
	Rp	Rp
Sewa Gedung Dibayar Dimuka	-	28.676.008
Jumlah	-	28.676.008

9 ASET TETAP

	1 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Kendaraan	407.243.000	48.886.000	-	-	456.129.000
Inventaris Kantor	299.511.900	56.562.000	-	-	356.073.900
Aset Tetap Lainnya	118.048.800	14.660.500	-	-	132.709.300
Jumlah	824.803.700	120.108.500	-	-	944.912.200

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

9 ASET TETAP (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan :

Kendaraan	(169.968.381)	(60.527.244)	-	-	(230.495.625)
Inventaris Kantor	(223.345.944)	(41.068.933)	-	-	(264.414.877)
Aset Tetap Lainnya	(11.197.158)	(21.079.579)	-	-	(32.276.737)
Jumlah	(404.511.483)	(122.675.756)	-	-	(527.187.239)
Nilai Buku	420.292.217				417.724.961

	1 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Biaya perolehan :					
Kendaraan	371.920.000	35.323.000	-	-	407.243.000
Inventaris Kantor	253.354.900	46.157.000	-	-	299.511.900
Aset Tetap Lainnya	36.147.000	81.901.800	-	-	118.048.800
Jumlah	661.421.900	163.381.800	-	-	824.803.700
Akumulasi Penyusutan :					
Kendaraan	(129.732.114)	(40.236.267)	-	-	(169.968.381)
Inventaris Kantor	(176.771.528)	(46.574.416)	-	-	(223.345.944)
Aset Tetap Lainnya	(449.448)	(10.747.710)	-	-	(11.197.158)
Jumlah	(306.953.090)	(97.558.393)	-	-	(404.511.483)
Nilai Buku	354.468.810				420.292.217

10. ASET LAIN-LAIN

	2024	2023
	Rp	Rp
BDD Asuransi Wuling 2020	485.965	973.081
BDD Asuransi Wuling 2021	1.209.800	1.186.886
BDD Jaringan Website	149.320	72.500
Finplay	342.000	342.000
Bandwith E-KTP	4.940.004	-
Jumlah	7.127.089	2.574.467

11. ASET TIDAK BERWUJUD

	2024	2023
	Rp	Rp
Program Aplikasi (Software)	212.641.100	210.981.100
Akumulasi Penyusutan Program Aplikasi (Software)	(142.151.667)	(125.107.167)
Jumlah	70.489.433	85.873.933

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

12. KEWAJIBAN SEGERA

	2024	2023
	Rp	Rp
Pajak Penghasilan Pasal 21	68.352.917	32.647.651
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito	2.915.731	2.162.054
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	6.281.020	-
Titipan Asuransi JAMKRIDA	21.862.320	10.394.680
Cadangan Pendidikan	79.978.943	49.874.675
Dana CSR Perusahaan	29.460.698	20.844.877
Titipan Asuransi Al Amin	298.800	8.612.684
Dividen yang belum dibagi	-	18.506.727
Titipan Nasabah	6.258.100	5.023.800
Lainnya	19.559.651	4.564.585
Jumlah	234.968.180	152.631.733

13. UTANG BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Utang Bunga Deposito 1 Bulan	-	4.254.436
Utang Bunga Deposito 3 Bulan	-	298.252
Utang Bunga Deposito 6 Bulan	-	8.871
Jumlah	-	4.561.559

14. PERPAJAKAN

a. UTANG PAJAK

	2024	2023
	Rp	Rp
Taksiran Pajak -PPH Pasal 25	38.385.939	-
PPH Pasal 29	4.977.786	56.657.735
Jumlah	43.363.725	56.657.735

b. PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi Akuntansi	1.461.233.203	1.338.266.951
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Beban makan dan minum tamu	31.780.900	17.286.000
Beban pajak	3.729.407	5.586.753
Biaya Promosi	66.795.401	-
Sumbangan	-	500.000
Pendapatan Bunga Tabungan dan/ Deposito setelah dipotong PPh	(330.033.386)	(200.794.997)
Jumlah	(227.727.678)	(177.422.244)
Laba (Rugi) Kena Pajak	1.233.505.525	1.160.844.707
Penghasilan Kena Pajak	1.233.505.525	1.160.844.707
Pembulatan	1.233.506.000	1.160.845.000

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

14. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Perhitungan Pajak Tahun 2024 dan 2023		
Mendapat Fasilitas	1.072.796.320	1.119.512.055
Tidak Mendapat Fasilitas	160.709.680	41.332.945
PPh Terutang		
Mendapat Fasilitas	118.007.595	123.146.326
Tidak Mendapat Fasilitas	35.356.130	9.093.248
Jumlah PPh Terutang	153.363.725	132.239.574
Pajak yang sudah dibayar Januari sd Desember	148.385.939	75.581.839
Total Pajak Terutang	4.977.786	56.657.735

15. TABUNGAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Tabungan		
Tabungan Simastala	4.432.967.352	3.387.968.512
Tabungan Sistala	96.506.349	34.532.376
Jumlah	4.529.473.701	3.422.500.888

16. DEPOSITO BERJANGKA

	2024	2023
	Rp	Rp
- Deposito 1 Bulan	1.425.000.000	1.760.000.000
- Deposito 3 Bulan	1.120.000.000	90.000.000
- Deposito 6 Bulan	-	30.000.000
- Deposito 12 Bulan	20.000.000	-
Jumlah	2.565.000.000	1.880.000.000

17. PINJAMAN DITERIMA

	2024	2023
	Rp	Rp
Pemda Tanah Laut	32.437.000.000	33.000.000.000
Jumlah	32.437.000.000	33.000.000.000

BPR memperoleh pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal dan diperbaharui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha kepada Usaha Mikro Kecil yaitu

Pinjaman modal usaha dapat berseumber dari APBD dan atau CSR dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut.

Suku Bunga : Pinjaman modal usaha dilaksanakan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank hanya dikenakan pengembalian atas pokok pinjaman atau bunga 0% (nol persen).

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) No : 15.08/02.0/3/SPTJM dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 15.08/02.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.000/P.04/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pelaksanaan realisasi investasi daerah berupa penempatan penyaluran dana investasi kepada bank perkreditan rakyat tanah laut tahun anggaran 2023

Tambahan plafond : 10.000.000.000

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

18. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

	2024	2023
	Rp	Rp
Imbalan Pasca Kerja	380.302.069	136.155.083
Jumlah	380.302.069	136.155.083

19. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham PT BPR Tanah Laut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Notaris Neddy Firmanto, S.h No 21 Notaris di Banjar. Modal Dasar PT. BPR Tanah Laut berjumlah Rp. 6.100.000.000 terbagi atas 122.000 lembar saham. Dengan komposisi penempatan Modal Saham Disetor PT BPR Tanah Laut adalah sebagai berikut:

	2023		
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal Disetor
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	27.000	22%	1.350.000.000
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	92.000	75%	4.600.000.000
PT. BPD Kalimantan Selatan	3.000	2%	150.000.000
Jumlah	122.000	100%	6.100.000.000

	2024		
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal Disetor
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	27.000	22%	1.350.000.000
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	92.000	75%	4.600.000.000
PT. BPD Kalimantan Selatan	3.000	2%	150.000.000
Jumlah	122.000	100%	6.100.000.000

20. CADANGAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Cadangan Umum	257.385.660	136.782.922
Cadangan Tujuan	257.385.660	136.782.922
Jumlah	514.771.320	273.565.844

21. SALDO LABA

	2024	2023
	Rp	Rp
Saldo Laba Awal Periode	1.206.027.377	1.112.243.789
Pembagian Dividen	(1.206.027.377)	(1.112.243.789)
Laba Tahun Berjalan	1.307.869.478	1.206.027.377
Jumlah	1.307.869.478	1.206.027.377

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

22. PENDAPATAN BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Kredit yang diberikan :		
- Kredit yang diberikan	3.601.366.396	3.312.784.081
Bunga dari Bank Lain		
- Tabungan	22.056.932	13.028.868
- Deposito	1.284.569.291	821.599.383
- Giro	75.598	160.049
- Pendapatan Bunga Lainnya	309.020.323	368.166.000
Pendapatan Provisi dan Komisi		
- Amortisasi Provisi Kredit	233.190.504	379.435.141
Jumlah	5.450.279.044	4.895.173.522

23. BEBAN BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Bunga Pada Pihak Lain		
- Beban Bunga Pinjaman Yang Diterima	47.883.981	40.418.037
- Beban Bunga Deposito ke Bank Lain	130.806.537	86.984.778
Jumlah	178.690.518	127.402.815

24. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
	Rp	Rp
Pend Lainnya - Adm Pasif Tabungan	8.475.503	7.180.507
Pend Lainnya - Adm Tabungan	51.153.898	57.160.429
Pend Lainnya - Pinalty	-	2.371.520
Pend Lainnya - Lainnya	9.152.991	15.332.421
Jumlah	68.782.392	82.044.877

25. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Penyisihan Kerugian		
- Penyisihan Penghapusan Aset	-	664.948.035
- PPAPWD - Antar Bank Aktiva	19.558.864	-
- PPAPWD - Kepada Pihak III Umum	209.571.324	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		
- Penyusutan Inventaris	62.148.512	57.347.501
- Penyusutan Kendaraan	60.527.244	40.210.892
- Penyusutan Program	17.044.500	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
- Penyusutan Software - PA	-	19.089.484
Jumlah	368.850.444	781.595.912

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

26. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2024	2023
	Rp	Rp
Beban Tenaga Kerja		
- Beban Gaji, Upah dan Honorarium	1.816.944.642	1.577.211.581
- Honorarium	165.763.975	135.581.214
- Tunjangan Lainnya	840.721.406	413.209.711
Beban Pemasaran		
- Biaya promosi	66.795.401	64.809.600
Beban Barang dan Jasa		
- Kantor Umum	13.375.600	8.208.125
- Fotocopy dan ATK	27.235.600	31.760.000
- Percetakan	15.150.000	7.600.000
- Listrik, Air dan Telepon	37.546.959	27.873.313
- BBM dan SPJ Karyawan	16.485.000	18.100.000
- BBM dan SPJ Direksi	55.500.800	22.214.369
- Makan dan Minum Kantor	31.780.900	17.286.000
- Makan dan Minum Tamu	465.500	565.500
- Telkom Wifi	25.930.780	25.646.652
- Peralatan dan Perlengkapan	14.019.450	8.884.800
- Materai	-	15.380.000
- Koran	-	1.500.000
- Konsultan AP dan KAP	19.620.000	-
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan	25.109.700	18.916.327
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Kantor	3.290.000	200.000
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Inventaris	2.003.000	850.000
- Beban Pemeliharaan / Gedung Kantor	11.797.500	-
Pajak-Pajak		
- Pajak Motor, Bumi dan Bangunan	3.369.407	5.153.680
- PPh Final Pasal 2 ayat 3	360.000	272.727
- Denda Pajak	-	5.586.753
Beban Sewa		
- Beban Sewa Gedung Kantor	28.676.008	28.675.992
Beban Pengembangan Karyawan		
- Pendidikan dan Pelatihan	185.250.000	175.500.000
Beban Lainnya		
- Premi Asuransi	174.164	29.387.400
- Beban Sewa Lainnya	10.622.313	8.940.179
Jumlah	3.417.988.105	2.649.313.923

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

27. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
	Rp	Rp
- Pengiriman Surat	1.516.000	1.008.600
- RUPS	18.020.000	16.150.000
- SIPO OJK	25.929.197	17.803.255
- Iuran Perbarindo	3.000.000	4.806.500
- Adm Bank BPD	240.000	308.966
- Adm Bank BRI	651.092	568.555
- Adm Bank Mandiri	878.082	642.037
- Adm Bank BSI	125.500	188.500
- Notaris Pendirian Perubahan PD-P	15.000.000	5.000.000
- Denda Eksternal	5.120.000	9.245.934
- Kredit/PTW	2.520.000	7.420.000
- Premi LPS	18.620.080	7.551.677
- Adm BPRS Barkah	80.000	60.000
- Adm Giro Bank BJB Banjar	315.119	158.234
- Adm Giro Bank Mandiri	-	827.710
- Adm BPR Mitratama	5.000	-
- Beban Adm Bank MI	272.900	240.000
- Biaya Perbaikan Dokumen Debitur - Kebakaran	-	300.000
- Biaya AP dan KAP	-	7.227.273
- Operasional Lainnya	6.196	631.557
Jumlah	92.299.166	80.138.798

28. BEBAN NON OPERASIONAL

	2024	2023
	Rp	Rp
- Lain lain - Sumbangan	-	500.000
Jumlah	-	500.000

29. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN

Dalam menyusun laporan keuangan Perseroan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyusutan

Perseroan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun Perseroan mereviu umur manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

PT. BPR TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022
Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Imbalan Pascakerja

Perseroan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan berhenti bekerja Perseroan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pension normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perseroan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode projected unit credit dan mengakui keuntungan-kerugian aktuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perseroan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

30. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dari halaman 2 sampai halaman 21 telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 8 April 2025.



Nomor : 00190/3.0290/AU.2/07/1183-2/1/IV/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan, Komisaris dan Direksi
PT. BPR TANAH LAUT

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR TANAH LAUT, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal – hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi

kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

ERFAN & RAKHMAWAN

Rudy Mikiyanto Kusumo, CPA

NRAP : AP. 1183

Surabaya, 8 April 2025

